



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka persidangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXII di New York, yang akan berlangsung dari tanggal 20 September sampai tanggal 20 Desember 1977, dipandang perlu memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Sidang tersebut.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

M E N G I N S T R U K S I K A N :

Kepada : Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia.

Untuk :

PERTAMA : Mempergunakan petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXII di New York.

KEDUA : Memberikan laporan kepada Presiden tentang Perkembangan Sidang selama berlangsungnya Sidang tersebut.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden.

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXII di New York.

KELIMA : ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KELIMA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 1977

TANGGAL 27 September 1977

PETUNJUK PENGARAHAN

BAGI DELEGASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

KE SIDANG MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

KE XXXII DI NEW YORK, 20 SEPTEMBER - 22 DESEMBER 1977

I. PENDAHULUAN.

1. Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan mengirimkan Delegasi untuk menghadiri dan ikut serta dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXII yang diselenggarakan di New York, mulai tanggal 20 September hingga 22 Desember 1977.
2. Dalam masa persidangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini, kehadiran dan ikut sertanya Indonesia ditandai oleh beberapa perkembangan keadaan seperti :
  - a. Di Indonesia :
    - (i) Telah terselenggarakannya secara tertib dan aman pada 2 Mei 1977 pemilihan umum untuk keanggotaan DPR/MPR yang bertugas bagi menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengangkat Presiden/Mandataris dan Wakil Presiden untuk masa 1978 sampai dengan 1983.
    - (ii) Pembinaan stabilisasi politik dan ekonomi nasional, yang terus diusahakan hingga tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-II, berjalan dengan baik dan semakin mantap, serta memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-II untuk tahun-tahun berikutnya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. Di kawasan Asia Tenggara :

- (i) Kerjasama dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dalam rangka ASEAN semakin bertambah mantap dengan telah diselenggarakannya pada awal Agustus 1977 Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-2 ASEAN di Kuala Lumpur yang bersepakat untuk meneruskan dan meningkatkan semua kerjasama yang telah dirintis sebelumnya oleh KTT ke-1 di Bali bulan Pebruari 1976.
- (ii) Berhasilnya dialog-dialog antara negara-negara ASEAN di satu pihak dengan Jepang, Australia, dan New Zealand masing-masing di lain pihak guna menggalang saling pengertian dan kerjasama yang lebih nyata dan saling menguntungkan.
- (iii) Adanya kecurigaan di pihak negara-negara Indochina terhadap ASEAN telah menimbulkan keprihatinan di kalangan negara-negara ASEAN yang dapat menghambat kerjasama yang saling menguntungkan antara negara-negara ASEAN dengan negara-negara Indochina tersebut.

c. Di dunia internasional :

- (i) Dikaitkannya pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat dengan penghormatan hak-hak azasi manusia telah berakibat negatif pada suasana detente antara Amerika Serikat - Uni Soviet dan terhadap bantuan-bantuan ekonomi dan pertahanan Amerika Serikat kepada sejumlah negara-negara dunia ketiga.
- (ii) Usaha-usaha perdamaian dan pengembalian stabilitas di beberapa wilayah krisis, seperti di Timur Tengah, termasuk Lebanon dan di Cyprus serta wilayah-wilayah lain masih belum mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.
- (iii) Rencana penarikan secara bertahap pasukan-pasukan Amerika Serikat dari Korea Selatan disamping akan dapat mendorong diadakannya dialog-dialog antara kedua Korea tetapi juga harus menjadi pendorong bagi negara-negara sekelilingnya, termasuk Indonesia untuk lebih percaya akan besarnya prinsip ketahanan nasional dan regional.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (iv) Makin meningkatnya oposisi rakyat pribumi di Afrika bagian Selatan (Rhodesia Selatan, Namibia, dan Afrika Selatan) terhadap politik kolonialisme dan rasialisme yang dijalankan oleh regim minoritas kulit putih di wilayah-wilayah tersebut.
  - (v) Pertentangan-pertentangan baru yang timbul diantara beberapa negara Afrika hitam yang juga melibatkan kepentingan-kepentingan strategis negara-negara besar dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut.
  - (vi) Hasil-hasil pertemuan Biro Koordinasi negara-negara non-blok di New Delhi, Konperensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab-Afrika dan KTT organisasi Persatuan Afrika semuanya dalam pertengahan pertama tahun 1977 telah memberikan indikasi bahwa pandangan-pandangan moderat pragmatis makin meluas diantara negara-negara yang sedang berkembang.
- d. Di bidang ekonomi internasional :
- (i) Dalam rangka pembentukan Tata Perekonomian Internasional Baru, yang menjadi aspirasi dan tujuan-tujuan dari negara-negara berkembang, adalah hubungan perdagangan internasional yang lebih adil dan wajar bagi negara-negara berkembang, peningkatan sumber-sumber keuangan, pelimpahan teknologi maupun ketrampilan kepada negara-negara berkembang.
  - (ii) Jalannya berbagai perundingan dalam fora internasional sampai dewasa ini, menjumpai banyak hambatan dan, pembatasan dalam perwujudan Tata Perekonomian Internasional Baru (TPIB).  
Berhubung dengan itu maka jelaslah bahwa perjuangan dari negara-negara berkembang untuk mencapai sasaran-sasaran seperti ditetapkan dalam Sidang-sidang Khusus ke-VI dan ke-VII Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu ditingkatkan, baik dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri maupun badan-badan dalam lingkungannya.
3. Peranan yang dilakukan Indonesia dalam gelanggang internasional erat hubungannya dengan Krida Pertama dari Sapta Krida Kabinet Pembangunan yang menyangkut pemeliharaan dan peningkatan stabilitas politik dalam negeri. Dalam rangka mengusahakan kelancaran pembangunan nasional dan pementapan ketahanan nasional



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pemerintah Indonesia memandang penting/perlu terjaminnya keamanan dan stabilitas politik di dunia pada umumnya dan di Asia Tenggara khususnya.

4. Dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipertegas oleh Garis-Garis Besar Haluan, Indonesia wajib tetap membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya dan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dan harmonis dengan semua negara.
5. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirimkan Delegasi ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXII.

## II . UMUM.

Di dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dan dibicarakan selama masa persidangan, Delegasi hendaknya diwajibkan mempergunakan segala kesempatan untuk terus memperjuangkan dan membela kepentingan nasional, serta waspada terhadap setiap gejala yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta mengganggu stabilitas politik, sosial ataupun ekonomi nasional yang mungkin timbul, baik secara langsung atau pun tidak langsung, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam tahun-tahun belakangan ini telah membawa bangsa Indonesia lebih jauh lagi ke arah perkembangan yang lebih berarti bagi kehidupan kesejahteraan dan kesentausaan bangsa serta perdamaian dunia; hal itu mempertebal kepercayaan pada diri sendiri dan selayaknya dapat lebih memantapkan pembawaan peranan kita di dunia internasional.
2. Kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan sesama negara ASEAN dimimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa selama ini, hendaknya terus dipelihara dan diperkembangkan lebih lanjut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Politik Non-Blok, yang sejalan pada politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional, khususnya pembangunan ekonomi, menjadi dasar kerjasama di dalam dan dengan kelompok negara-negara Non-Blok lainnya sepanjang kerjasama itu bersifat konstruktif dan tidak merugikan kepentingan nasional.
4. Kerjasama dengan negara-negara Asia-Afrika, Kelompok 77 dan kelompok-kelompok lainnya yang mempunyai persamaan kepentingan dan melakukan usaha-usaha yang seiring dengan Pemerintah Republik Indonesia, hendaknya tetap dipelihara dan ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

### III. KHUSUS.

#### A. MASALAH TIMOR TIMUR.

1. Sebagai hasil pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor Timur yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1976 dan dikukuhkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 17 Juli 1976, maka Timor Timur telah menjadi bagian integral wilayah Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
2. Karena itu pembicaraan mengenai Timor Timur oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXII dan oleh badan internasional apapun tidak dapat dibenarkan, sebab hal itu merupakan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Indonesia.
3. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Delegasi menentang pembicaraan mengenai Timor Timur oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXII.
4. Setiap resolusi yang diambil oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXII mengenai Timor Timur yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dianggap tidak mengikat bagi Indonesia.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

## B. MASALAH-MASALAH POLITIK INTERNASIONAL.

### 1. Indo China.

Sikap negara-negara Indo China yang menentang Deklarasi ASEAN tentang Zone Damai, Bebas, dan Netral di Asia Tenggara dan menyerang ASEAN memerlukan tetap terpeliharanya kewaspadaan tinggi terhadap segala kemungkinan subversi/infiltrasi komunis. Kemungkinan-kemungkinan itu harus senantiasa diperhitungkan dalam hubungan dengan negara-negara tersebut, tetapi disamping itu secara sadar harus diteruskan pengembangan hubungan persahabatan dan kerjasama yang saling menguntungkan dan berdasar atas hidup berdampingan secara damai. Delegasi hendaknya mengadakan konsultasi-konsultasi erat dengan negara-negara ASEAN lainnya agar sikap bersama negara-negara ASEAN terhadap negara-negara di Indo China tetap dijaga, dipelihara, dan dikonsolidasikan.

### 2. Samudera Hindia sebagai Zone Perdamaian.

Masalah ini merupakan kelanjutan pembahasan oleh Sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lampau. Dalam menelaah soalnya, Delegasi hendaknya berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN serta negara-negara pantai lainnya. Untuk mengusahakan agar tujuan-tujuan yang termaktub dalam Deklarasi Samudera Hindia sebagai zone Perdamaian dapat terlaksana. Disamping itu perlu pula disinggung dan dijelaskan lagi Deklarasi ASEAN tentang Wilayah Damai, Bebas, dan Netral di Asia Tenggara.

### 3. Timur Tengah.

Indonesia mendukung perjuangan serta tuntutan-tuntutan yang sah dari Bangsa-Bangsa Arab dan tetap berpendapat bahwa penyelesaian masalah Timur Tengah harus didasarkan pada dua prinsip :

- a. Penarikan mundur Israel segera dan tanpa syarat dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya semenjak 5 Juni 1967, dan
- b. pelaksanaan semua hak - hak nasional rakyat Palestina, termasuk hak-hak untuk kembali ke tanah airnya, hak-hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

anggota Komite Palestina, Indonesia supaya ikut mendesak majelis Umum dan Dewan Keamanan guna memaksa Israel melaksanakan segera rekomendasi-rekomendasi Komite tersebut. Khususnya mengenai tindakan-tindakan Israel untuk merubah susunan demografis dan kebudayaan serta penindasan-penindasan terhadap rakyat Palestina di wilayah-wilayah yang diduduki Israel harus dikecam.

4. Korea.

Indonesia menganjurkan agar dimulai lagi adanya dialog antara Korea Utara dan Korea Selatan sehingga dapat diperoleh penyelesaian secara damai. Penarikan mundur pasukan-pasukan dibawah Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa hendaknya dibarengi dengan suatu pengaturan keamanan lain, sehingga perdamaian akan dapat tetap dipertahankan.

5. Konperensi Hukum Laut.

Indonesia rnengharapkan Konperensi Hukum Laut berhasil membuat Konvensi Hukum Laut dimana tercakup prinsip-prinsip Wawasan Negara Nusantara. Karena itu Indonesia dapat menyetujui diadakannya Sidang ke-7 Konperensi Hukum Laut ke-III di Jenewa dalam tahun 1978 guna dapat menyempurnakan perumusan tentang Wawasan Negara Nusantara yang dihasilkan oleh Sidang ke-6 Konperensi Hukum Laut ke-III.

6. Dekolonisasi dan Apartheid.

Indonesia mendukung perjuangan yang dilakukan bangsa-bangsa Afrika Selatan dengan segala jalan untuk memperoleh kemerdekaan mereka dan hak-hak azasi kemanusiaan. Disamping itu diharapkan bahwa dapat tercapai penyelesaian masalah-masalah itu dengan cara damai. Dalam hal ini prakarsa yang dilakukan oleh Amerika dan Inggris perlu mendapat perhatian sewajarnya.

Dukungan yang diberikan Indonesia di Konperensi Maputo dan Konperensi Lagos, bagi perjuangan pembebasan menentang kolonialisme dan apartheid hendaknya ditegaskan lagi.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

## C. MASALAH-MASALAH EKONOMI DAN SOSIAL

### 1. ECOSOC

Delegasi Indonesia hendaknya terus bersama dengan negara-negara berkembang lainnya mengusahakan peningkatan peranan Dewan Ekonomi dan Sosial sebagai badan yang membantu Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengadakan penilaian kemajuan, mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mempersiapkan saran-saran kebijaksanaan di bidang ekonomi dan sosial.

### 2. U.N.C.T.A.D.

Delegasi Indonesia hendaknya menyesuaikan posisinya dengan Kelompok 77 umumnya maupun ASEAN khususnya. Sesuai dengan pokok-pokok rekomendasi yang telah disetujui oleh Sidang para Menteri Ekonomi ASEAN di Pattaya, Thailand, tanggal 2 - 4 September 1977, Delegasi Indonesia perlu :

- a. Tetap melakukan desakan agar dapat segera terbentuk Dana Bersama dalam rangka Program Komoditi Terpadu, sebagai sumber utama pembiayaan cadangan penyangga.
- b. Terus melakukan desakan pula agar negosiasi - negosiasi Komoditi individuil dalam rangka Program Komoditi Terpadu dapat diselesaikan secepat mungkin.

Delegasi Indonesia bersama dengan Kelompok 77 hendaknya dapat terus mengusahakan peningkatan posisi yang telah dicapai selama ini, terutama kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di Konperensi Paris mengenai Dana Bersama dalam rangka Program Komoditi Terpadu dan Bantuan Pembangunan Resmi dengan mengusahakan diperolehnya commitment politik untuk dapat terwujudnya Dana Bersama termaksud, serta peningkatan arus Bantuan Pembangunan Resmi.

Mengenai masalah hutang negara-negara berkembang kiranya perlu diusahakan adanya suatu keputusan yang bersifat memberikan dorongan politik kepada Pertemuan Tinggi Menteri dalam rangka Sidang Khusus Badan Perdagangan dan Pembangunan UNCTAD ke-IX yang akan diadakan pada bulan Januari 1978 yang akan datang.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

3. Sidang mengenai bidang-bidang lainnya seperti pelimpahan teknologi, pelayaran, kerja sama ekonomi diantara negara-negara berkembang, moneter dan pembiayaan, Delegasi Indonesia hendaknya memperhatikan kemajuan pembahasan yang telah dicapai dan selalu memperhatikan posisi Kelompok 77 dalam menentukan sikapnya.

4. U.N.I.D.O.

Sebagai pedoman umumnya hendaknya Delegasi Indonesia senantiasa berlandaskan kepada Deklarasi dan Rencana Aksi Lima Tahun yang telah menggariskan usaha-usaha yang harus ditempuh dalam rangka menuju pembentukan Tata Perekonomian Internasional Baru, disamping Rencana Pembangunan Lima Tahun khususnya yang menyangkut bidang industri.

5. U.N.I.T.A.R.

Agar Delegasi Indonesia selalu menekankan terus diusahakannya penyesuaian-penyesuaian atas program-program dan kegiatan UNITAR untuk lebih mendukung usaha terciptanya Tata Perekonomian Internasional Baru.

6. AKTIVITAS OPERASIONAL BAGI PEMBANGUNAN

a. UNDP

Delegasi Indonesia hendaknya tetap menekankan pentingnya peranan UNDP sebagai badan pembangunan dan koordinator sentral bantuan teknik PBB dalam rangka Country Programming, dengan menggaris bawahi hak prerogatif masing-masing Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan termaksud.

Disamping itu Delegasi Indonesia perlu tetap mendukung pelaksanaan dimensi baru dalam kerjasama teknik, dengan peningkatan penggunaan keahlian dan peralatan setempat, serta kerjasama tehnik antara negara-negara berkembang.

b. UNFPA

Delegasi Indonesia hendaknya menekankan agar aplikasi kriteria bagi penetapan negara-negara prioritas dilaksanakan secara fleksibel dan bertahap, dan perhatian



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

khusus diberikan kepada negara-negara yang masih tetap memerlukan bantuan UNFPA untuk menjaga momentum program kependudukan yang sudah berjalan.

7. U.N.E.P.

Secara umum dapat dikemukakan bahwa dalam usaha untuk meningkatkan keadaan lingkungan hidup hendaknya Delegasi Indonesia menekankan bahwa jangan hanya diperhatikan keseimbangan antara perlindungan lingkungan hidup disatu pihak dan kemajuan dan pembangunan dilain pihak, tetapi juga perlu diperhatikan masalah manajemen dari hubungan tersebut.

8. MASALAH-MASALAH PANGAN

Secara umum Delegasi Indonesia hendaknya mendukung konsensus luas dan terpadu yang telah tercapai dalam Sidang Dewan Pangan Dunia Ketiga di Manila baru-baru ini, terutama yang meliputi komponen-komponen pokok dari resolusi-resolusi Konperensi Pangan Dunia di bidang peningkatan produksi pangan, peningkatan produksi sarana pangan, bantuan pangan dan keamanan pangan untuk menuju swasembada pangan.

9. PENILAIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA, TATA PEREKONOMIAN INTERNASIONAL BARU, PIAGAM MENGENAI HAK-HAK DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN NEGARA, DAN PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL.

- a. Pada dasarnya Indonesia beranggapan bahwa Dasawarsa Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedua sebagai strategi pembangunan internasional masih tetap berlaku, walaupun usaha harus dicari untuk meningkatkan pelaksanaan dari saran-saran kebijaksanaan yang terdapat dalam Strategi Pembangunan Internasional tersebut.
- b. Mengenai usaha penyusunan Strategi Pembangunan Internasional yang baru, Indonesia pada dasarnya beranggapan bahwa persiapan-persiapan ke arah itu perlu diadakan, walaupun persiapan-persiapan substantif kiranya dapat diadakan oleh



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

UNCTAD. Kita harus senantiasa waspada kepada setiap usaha untuk mengalihkan perhatian kita kepada pelaksanaan dari saran-saran kebijaksanaan dalam Dasawarsa Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedua. Dalam hubungan ini perlu selalu adanya koordinasi dan konsultasi pendapat dengan kelompok 77.

#### 11. KERJASAMA EKONOMI DIANTARA NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.

- a. Semua usaha menuju peningkatan Kerjasama diantara negara-negara berkembang harus diarahkan untuk menciptakan swa sembada kolektif, baik di tingkat regional, sub regional, atau inter regional.
- b. Agar Delegasi Indonesia menekankan bahwa negara-negara industri, baik Barat maupun Timur, harus terus memberikan bantuan mereka kepada setiap usaha kerjasama ekonomi diantara negara-negara berkembang di bidang perdagangan, industri, keuangan, dan perbankan, pengangkutan, dan komunikasi, dan lain-lainnya.

#### 12. AKSELERASI PELIMPAHAN SUMBER-SUMBER KEUANGAN RIIL KE NEGARA-NEGARA BERKEMBANG.

Mengingat bahwa bantuan pembangunan resmi, baik melalui saluran bilateral atau multilateral, masih dianggap sebagai komponen penting dalam pembiayaan pembangunan nasional, maka Delegasi Indonesia dapat mendukung setiap usaha-usaha yang mendorong ke arah tercapainya sasaran yang telah ditetapkan oleh Dasawarsa Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa Kedua.

#### 13. KONPERENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TENTANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI BAGI PEMBANGUNAN.

Dalam rangka pembentukan Tata Perekonomian Internasional Baru, menegakkan swa sembada individuil dan kolektif di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, Delegasi Indonesia dapat mendukung usaha-usaha ke arah berhasilnya Konperensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Pembangunan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

#### IV. LAIN-LAIN.

1. Dalam usaha menggalang kerjasama dengan sesama negara berkembang, hendaknya Delegasi dapat sejauh mungkin menghindarkan diri dari sikap, tuntutan dan tindakan yang bersifat ekstrim.
2. Persoalan-persoalan lain yang timbul di dalam dan selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXII, penyelesaian diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Delegasi dan dilakukan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pemerintah.
3. Dalam hal-hal yang prinsipial, Delegasi hendaknya selalu berhubungan dengan menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi untuk mendapatkan instruksi selanjutnya.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXII, Delegasi hendaknya telah menyampaikan laporan yang menyeluruh dari hasil-hasil Sidang untuk diserahkan kepada Presiden.